

DPRD Kalbar Rugikan Keuangan Negara

Temuan BPK Harus Diproses Hukum

PONTIANAK. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kalbar tahun anggaran 2010 merugikan daerah sebesar Rp83 juta. Peristiwa memalukan lembaga terhormat itu harus diproses hukum.

"Harus ada penjelasan dari pihak sekretariat DPRD Kalbar, termasuk 11 anggota DPRD yang menggunakan uang perjalanan dinas tersebut," tegas Deman Huri, Direktur Lembaga Pengkajian dan Study Arus Informasi Regional (LPS-AIR) Kalbar kepada Equator, Kamis (11/8). Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar itu, perjalanan dinas anggota DPRD ganda sebesar Rp27,3

juta. Perjalanan dinas bersamaan jadwal sidang Rp48,6 juta, dan perjalanan dinas bersamaan jadwal Reses sebesar Rp7,1 juta.

Demam berharap rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Terutama rekomendasi BPK yang memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis TP/TGR Provinsi Kalbar untuk memproses penetapan indikasi kerugian daerah tersebut.

Termasuk rekomendasi BPK yang memerintahkan Sekretaris DPRD, selaku pengguna anggaran untuk melakukan perbaikan atas ketidapatuhan, supaya pada masa yang akan datang tidak terjadi lagi. "Permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti, sehingga se-

depan hal tersebut tidak terulang lagi. Apalagi persoalan itu terjadi di lembaga wakil rakyat yang terhormat. Anggota DPRD yang bersangkutan harus mengembalikan uang ke kas daerah," tegas Deman.

Dikatakan Deman, meski 11 anggota DPRD itu sudah mengembalikan uang perjalanan dinas yang sudah terpakai itu ke kas daerah, kasus tersebut tidak bisa hilang begitu saja. "Bisa saja persoalan tersebut diproses hukum," ungkapnya.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Gubernur Kalbar agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris DPRD. Karena tidak mema-

tuhi ketentuan terkait pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBD. Serta memberikan sanksi kepada PPK Sekretariat DPRD yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi pertanggungjawaban realisasi belanja sesuai ketentuan.

"Pihak Sekretariat DPRD juga harus bertanggungjawab. Disinilah kita bisa melihat sikap tegas gubernur, apakah berani atau tidak memberikan sanksi kepada bawahannya yang bermasalah. Saya berharap Gubernur Cornelis melaksanakan rekomendasi BPK itu, yakni memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,"

saran Deman.

Diberitakan sebelumnya, ada 11 anggota DPRD Kalbar yang masuk daftar temuan BPK terkait temuan perjalanan dinas luar daerah tersebut. Pertama, perjalanan dinas ganda ada empat anggota DPRD Kalbar, yakni Nicodemus R Toun, Sy Umar Alkadrie, Alifudin dan Prabasa Anantatur.

Kedua, perjalanan dinas bersamaan jadwal sidang ada enam legislator Kalbar, masing-masing Minsin, Gusti Effendi, Tapanus, Thomas Aleksander, Syafrani dan Bachwi. Selanjutnya, perjalanan dinas bersamaan jadwal Reses, Ary Pudyanti.

Dari 11 legislator Kalbar yang masuk daftar temuan BPK itu, ada



tiga unsur pimpinan DPRD dari empat unsur pimpinan yang ada, masing-masing Ketua DPRD Min-

sen (PDIP), Wakil Ketua Prabasa Anantatur (Golkar) dan Nicodemus R Toun (Demokrat). (Jul)